



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 12 /III/2023**

TENTANG

**PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI PENDAPATAN
SATKER INAKTIF TAHUN 2022**

1. Dasar:

- Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-24/PB.6/2023 tanggal 25 Maret 2023 tentang Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi Pendapatan Satker Inaktif Tahun 2022.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI agar Satker memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan monitoring data Aplikasi MonSAKTI, terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Pendapatan pada Satker Inaktif yang disebabkan setoran penerimaan negara bukan pajak menggunakan kode satker inaktif. TDK Pendapatan tersebut dapat diakses melalui menu Rekonsiliasi → Rekon SAKTI-SPAN Satker Inaktif. Data detil terkait PNPB tersebut juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/TDK_inaktif.
- b. Sehubungan hal di atas, untuk menyajikan pendapatan yang andal pada Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 kami mohon satker agar segera menyelesaikan TDK Pendapatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Kemhan dan TNI mengakui setoran PNPB pada Satker inaktif, maka satker di lingkungan Kemhan dan TNI agar menyampaikan daftar setoran yang diakui dan kode Satker aktif yang akan mencatat PNPB tersebut sesuai format pada Lampiran I Surat Edaran Kapuslapbinkuhan ini. Selanjutnya KPPN mitra akan mengoreksi setoran PNPB pada Satker inaktif menjadi PNPB pada Satker aktif. Berdasarkan hasil koreksi tersebut, Satker aktif agar melakukan penginputan dokumen setoran PNPB pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI.
 - 2) Dalam hal Kemhan dan TNI tidak diakui setoran PNPB pada Satker inaktif, maka satker di lingkungan Kemhan dan TNI agar menyampaikan daftar setoran yang tidak diakui sesuai format pada Lampiran II Surat Edaran Kapuslapbinkuhan ini. Selanjutnya KPPN mitra akan mengoreksi setoran PNPB pada Satker inaktif menjadi PNPB pada Satker Suspen (BA BUN 999.99).
- c. Langkah penyelesaian sebagaimana diatur pada huruf b. dibukukan pada Periode 14 Tahun 2022 setelah mendapat persetujuan Auditor BPK. Setelah mendapat persetujuan BPK, satker di lingkungan Kemhan dan TNI menyampaikan daftar setoran yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai format pada Lampiran III Surat Edaran Kapuslapbinkuhan ini.
- d. Untuk memudahkan rekapitulasi data dan tindak lanjutnya, surat penyampaian data setoran satker inaktif dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dalam bentuk pdf dan data setoran dalam bentuk excel agar diunggah ke tautan https://bit.ly/TDK_inaktif paling lambat tanggal 6 April 2023.

- e. Berdasarkan data yang disampaikan oleh satker di lingkungan Kemhan dan TNI, Direktorat APK menyampaikan daftar setoran ke KPPN mitra kerja satker inaktif untuk selanjutnya KPPN melakukan proses koreksi pada aplikasi SPAN dengan tanggal buku 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal PNBP diakui oleh satker di lingkungan Kemhan dan TNI maka PNBP dikoreksi ke satker aktif, hasil koreksi disampaikan ke Dit. APK dengan tembusan satker terkait; dan
 - 2) Dalam hal PNBP tidak diakui oleh satker di lingkungan Kemhan dan TNI maka PNBP dikoreksi ke satker suspen, hasil koreksi disampaikan ke Dit. APK dengan tembusan satker terkait dan KPPN Khusus Penerimaan.
- f. Atas perubahan data tersebut di atas, Satker dan KPPN melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana mestinya.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E, M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I
 Surat Edaran Kapusiappinkuan Kemhan
 Nomor : SE/ 12 /III/2023
 Tanggal : 28 Maret 2023

**DAFTAR SETORAN YANG DIAKUI SEBAGAI PNBP
 PADA**

No	Satker Inaktif		Kode KPPN	Kode Akun	NTPN	Tgl. Buku	Nilai	Satker Aktif	
	BA/Eselon I	Kode Satker						BA/Eselon I	Kode Satker
1.	00101	123456	018	425911	ABCDEF1234567890	12-10-2022	25.000.000	00101	654321
2.									
3.									
4.									
5.									

<kota>, <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan>

<nama>

Kepala
 Pusat Pelaporan dan Pembinaan
 Keuangan Pertahanan



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
 Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II
Surat Edaran Kapuslapbinkuan Kemhan
Nomor : SE/ 12 /III/2023
Tanggal : 28 Maret 2023

**DAFTAR SETORAN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI PNBP
PADA.....**

No	BA/Eselon I	Kode Satker	Kode KPPN	Kode Akun	NTPN	Tgl. Buku	Nilai
1.	11101	112233	019	425912	ABC1234567890DEF	21-04-2022	7.500.000
2.							
3.							
4.							
5.							

<kota> ; <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan>

<nama>

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran III
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 12 /III/2023
Tanggal : 28 Maret 2023

«KOP SURAT»

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NRP/NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa koreksi PNBPN sebagaimana daftar terlampir telah disetujui oleh Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, dan seluruh perubahan data PNBPN tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<kota>, <tanggal bulan tahun>

<tanda tangan bermaterai>

<nama>

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan

Amad Sugiyono, S.E, M.M.
Brigadir Jenderal TNI

